

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Bulan Januari 2026, terjadi deflasi m-to-m sebesar 0,87%, inflasi y-on-y sebesar 2,55% dan deflasi y-to-d sebesar 0,87%
 1. Penyumbang utama deflasi bulan Januari 2026 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 1,02%.
 2. Komoditas penyumbang dominan deflasi secara m-to-m antara lain Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Bensin, dan Telur Ayam Ras
 3. Penyumbang utama inflasi bulan Januari 2025 secara y-on-y adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 1,54%.
 4. Komoditas penyumbang dominan inflasi secara y-on-y antara lain Tarif Listrik, Emas Perhiasan, Santan Segar, Beras, dan Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu.
2. Bulan Februari 2026, terjadi deflasi m-to-m sebesar 0,68%, inflasi y-on-y sebesar 4,76% dan inflasi y-to-d sebesar 0,53%.
 1. Penyumbang utama inflasi Februari 2026 secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi 0,45%.
 2. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, cabai merah, tomat, beras, dan telur ayam ras.
 3. Penyumbang utama inflasi Februari 2026 secara y-on-y adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi 2,26%.
 4. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik dan biaya sewa rumah. Khusus tarif listrik, dorongan inflasinya disebabkan karena tarif listrik kembali normal setelah mengalami diskon 50 persen pada Februari 2025.
3. Bulan Maret 2026 terjadi inflasi m-to-m sebesar 0,81%, inflasi y-on-y sebesar 3,83% dan inflasi y-to d sebesar 0,78%
 1. Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2026 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,67%.
 2. Komoditas penyumbang dominan inflasi secara m-to-m antara lain Daging Ayam Ras, Jengkol, Ikan Tuna, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu, dan Jeruk.
 3. Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2026 secara y-on-y adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 2,57%.
 4. Komoditas penyumbang dominan inflasi secara y-on-y antara lain Daging Ayam Ras, Tarif Listrik, Emas Perhiasan, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu, dan Beras.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

1. Januari
 1. Curah hujan yang tinggi membuat Gangguan distribusi bahan pokok seperti (beras, cabai, bawang).
 2. Kenaikan harga komoditas hortikultura akibat pasokan terbatas.
 3. Ketergantungan pasokan dari luar daerah (Sumatera Barat dan Kerinci).
 4. Penyesuaian harga di awal tahun (tarif angkutan dan biaya distribusi) sehingga Inflasi bersifat volatile food.

Februari

1. Mulai peningkatan permintaan menjelang Ramadhan terhadap komoditas daging ayam, telur ayam, minyak goreng dan gula pasir.
2. Spekulasi dan penahanan stok oleh pedagang tertentu.
3. Keterbatasan operasi pasar murah.
4. Belum optimalnya data ketersediaan stok riil di pasar.

3. Maret

1. Periode ini menjadi puncak tekanan inflasi karena Lonjakan Permintaan, Konsumsi meningkat signifikan (bahan pangan, pakaian, transportasi) dan Tradisi belanja lebaran meningkatkan daya beli sementara.
2. Gangguan Distribusi, Arus mudik mempengaruhi distribusi barang dan Kenaikan tarif angkutan barang dan penumpang.
3. Komoditas Paling Rentan Cabai merah & rawit, Bawang merah, Daging ayam & sapi, Telur ayam, Beras dan Minyak goreng.

4. Kesimpulan

1. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah dan Produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan saat permintaan tinggi.
2. Belum beroperasinya Gudang Penyimpanan (Cold Storage)
3. Belum Optimalnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sehingga Perlu penguatan kerja sama distribusi pangan.
4. Data Harga dan Stok Belum Real Time dan Monitoring belum sepenuhnya berbasis digital.
5. Distribusi ke wilayah terpencil sehingga biaya logistik tinggi karena kondisi geografis.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Mukomuko :

1. Tim TPID melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko melaksanakan Buka Irigasi Manjuto Kiri untuk Pola Tanam.
 2. Tim TPID melaksanakan Capacity Building tentang penyusunan program unggulan daerah yang difasilitasi oleh Bank Indonesia di Bengkulu.
 3. Tim TPID melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko melaksanakan Koordinasi dengan Bulog terkait pelaksanaan pasar murah.
 4. Tim TPID melalui Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko melaksanakan kegiatan Panen Jagung Program Satu Desa Satu Hektar (Sadesahe) Jagung di beberapa wilayah di Kabupaten Mukomuko. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi jagung di provinsi Bengkulu dan menjaga stabilitas harga pasokan jagung untuk membantunmencegah peningkatan laju inflasi komoditas jagung.
 5. Tim TPID melalui Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko melaksanakan kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Cabai (Tanam, perkembangan, dan panen) sebagai upaya untuk meningkatkan produksi Cabai dan pengembangan budidaya Bawang Merah di Kabupaten Mukomuko dalam rangka membantu mengatasi laju inflasi daerah
 6. Tim TPID melalui Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko melaksanakan kegiatan survey
- 2.

harga dan ketersediaan produk bahan pangan asal hewan.

7. Tim TPID melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko melakukan pemantauan dan sidak pasar ketersediaan pangan dan harga harga sembako rutin di pasar tradisional. Hal ini untuk memantau komoditas utama (beras, bawang merah, minyak goreng, cabai) harga dan pasokan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum bulan puasa ramadhan.
8. Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mukomuko melaksanakan Rapat Tim Teknis TPID secara rutin dalam rangka memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilisasi dan memperkuat sinergi dalam mendukung pengendalian inflasi pangan.
9. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko merilis/publikasi pelaksana program masing-masing dinas terkait dalam rangka Pengendalian Inflasi.
10. Tim TPID Kabupaten Mukomuko melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di Distributor. Hasil monitoring dari distributor, untuk ketersediaan terpantau aman serta harga bahan pokok lain relatif stabil. Kegiatan monitoring bahan pokok ini selalu dipersiapkan untuk mengantisipasi pergerakan harga, apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, baik disebabkan gangguan pasokan maupun distribusi bahan pangan.
11. Tim TPID melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko melaksanakan Operasi Pasar (Pasar murah) dan Dinas Ketahanan Pangan Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Kabupaten Mukomuko guna mengendalikan harga dan menekan inflasi serta untuk membantu masyarakat menyediakan kebutuhan pokok.
12. Tim TPID Kabupaten Mukomuko Melalui Dinas Pertanian Dalam Rangka Pendampingan Penyaluran Dan Serah Terima Bantuan Bibit Tanaman Buah-Buahan Unggul Bersertifikat Dari Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Untuk Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani Yang Tersebar Di Kabupaten Mukomuko.
13. Tim TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan Melaksanakan Pemantauan dan Survey Harga dan Stok Komoditas Strategis di wilayah Kabupaten Mukomuko guna mengendalikan harga dan menekan inflasi serta untuk membantu masyarakat menyediakan kebutuhan pokok.
14. Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mukomuko mengikuti High Level Meeting se Provinsi Bengkulu rangka memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilisasi dan memperkuat sinergi dalam mendukung pengendalian inflasi pangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalaian Inflasi di Kabupaten Mukomuko :

1. Kebijakan stabilisasi harga melalui pemantauan harga harian dan koordinasi dengan distributor serta pedagang pasar telah berjalan cukup baik. Harga sebagian besar bahan kebutuhan pokok relatif terkendali, meskipun terdapat kenaikan terbatas pada beberapa komoditas pangan strategis.
2. Kegiatan operasi pasar dan pasar murah telah dilaksanakan sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah untuk menekan kenaikan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
3. Koordinasi TPID Kabupaten Mukomuko berjalan secara rutin melalui rapat koordinasi dan pemantauan bersama perkembangan harga.
4. Penyampaian informasi terkait ketersediaan dan harga bahan pokok kepada masyarakat telah dilakukan melalui media dan koordinasi lintas sektor.

Dukungan anggaran pengendalian inflasi telah tersedia namun masih terbatas untuk

5. pelaksanaan intervensi skala besar.
 6. Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Mukomuko pada Triwulan I telah berjalan **cukup efektif** dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan intervensi harga, perluasan cakupan program, serta peningkatan koordinasi dan respons cepat terhadap potensi gejolak harga.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

1. Keterjangkauan Harga

1. Melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara terfokus pada komoditas yang mengalami kenaikan harga.
2. Meningkatkan intensitas pemantauan dan pengawasan harga di pasar tradisional.
3. Mengantisipasi kenaikan harga dengan intervensi lebih dini sebelum terjadi lonjakan signifikan.
4. Memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga

2. Ketersediaan Pasokan

1. Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, khususnya beras
2. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan sarana pertanian dan pendampingan petani.
3. Memperkuat kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan komoditas yang masih bergantung dari luar daerah
4. Mengoptimalkan peran Bulog dalam menjaga ketersediaan pasokan.

3. Kelancaran Distribusi

1. Memastikan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok antar kecamatan.
2. Mengidentifikasi dan menangani secara cepat hambatan distribusi, termasuk kendala transportasi dan infrastruktur
3. Meningkatkan koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk menjaga pasokan tetap lancar
4. Mengoptimalkan peran OPD teknis dalam pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok.

4. Komunikasi Efektif

1. Menyampaikan informasi harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin dan transparan kepada masyarakat.
2. Melakukan edukasi publik untuk mendorong pola konsumsi yang bijak
3. Memperkuat peran media lokal, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dalam penyampaian informasi.
4. Meningkatkan koordinasi komunikasi antar anggota TPID agar pesan kebijakan tersampaikan secara konsisten.